

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abidin, Zaenal, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Cet. Ke-3, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amour, John, Henry Hansmann, dan Reinier Kraakman, 2009, *The Essential Elements Of Corporate Law: What Is Corporate Law?*, Center for Law, Economics, and Business Harvard University, Cambridge.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyumardi Mazhar, 2003, *Pemberantasan Korupsi Menuju Tata Pemerintahan yang Baik: Makalah Seminar Internasional, Praktik-Praktik yang Baik dalam Memerangi Korupsi di Asia*, Transparency International Indonesia, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2014, *korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pembarantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary*, 8 th .ed., St. Paul, MN, USA, Thomson-West.
- Grabosky, Peter dan John Braithwaite, 1987, *Corporate crime in Australia. Trends & issues in crime and criminal justice*, Australian Institute of Criminology, Canberra.

- Hamzah, Andi, 1997, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Komisi pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung.
- Madril, Oce, Agung Nugroho dan Eka Nanda R., 2020, *Menjerat Korupsi Korporasi*, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, PT Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, *Pergeseran Perspektif dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan*, Tahun Ke XXI No. 246, 2006, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, *Teman-Teman, Masalah Penegakan Hukum (suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta.

- Rufinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sianturi., S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni - AHM-PTHM, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah F., 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Simpson, Sally S., 2002, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dailog tentang Keilmuan Dewasa ini*, Gramedia, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Kelompok Kerja Penyusunan Perma Pidana Korporasi, 2017, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widnyana, I. Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Yudoprakoso, Paul W, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, PT Kanisius, Yogyakarta.

B. Jurnal

- Henry Donald Lbn. Toruan, “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi”, *RechtsVinding*, Vol. 3, No. 3, Desember 2014.
- Hikmawati, Puteri, “Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2017.

- Jakobus S., Lambok Marisi, “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Integritas*, Vol. 5, No. 2, Desember, 2019.
- Kristian, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4, Oktober 2013.
- Intansasmita, Munajat, “Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Brawijaya, Malang, 2015.
- Machmudin, Dudu Duswara, “Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung”, *Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret, 2013.
- Musatajab, Yuda dan Mulyadi A. Tajuddin, “Uang Pengganti Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Restorative Justice*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.
- Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Ilmu Hukum*, No. 66, November, 2015.
- Pelafu, Fiona L, “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. VI, Nomor 3, Mei, 2017.
- Santo, Paulus Aluk Fajar Dwi, “Tinjauan Subjek Hukum Korporasi Dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana”, *Humaniora*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2012.
- Suhariyanto, Budi, “Urgensi Pemidanaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantum Dalam Kepengurusan Kajian Putusan Nomor 1081 K/PID.SUS/2014”, *Yudisial*, Vol.10, No. 3, Desember 2017.
- Suhariyanto, Budi, “Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara”, *RechtsVinding*, Vol. 5, No. 3, Desember 2016.
- Suhariyanto, Budi, “Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara”, *RechtsVinding*, Vol. 7, No. 1, April, 2018.
- Suhariyanto, Budi, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat”, *RechtsVinding*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

Sunaryo, Thomas, “Kejahatan, Korporasi dan Teknologi (Beberapa aspek Kriminologi)”, *Hukum dan pembangunan*, Vol. XVII, No.6, Desember 1987.

Suhariyono AR, “Pententuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember, 2009.

Wardanie, Ismaya Hera, “Efektivitas Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi”, *Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019.

C. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Alamsyah, Wana, 2021, *Kinerja Penindakan Korupsi Tahun 2020*, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Dewi, Lani Kumala, 2017, *Pelaksanaan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Di Kejaksaan Negeri Denpasar)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Indonesian Corruption Watch, 2021, *Hasil Pemantauan Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2020 “Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri efek Jera” Rata-Rata Hukuman Koruptor Hanya 3 Tahun 1 Bulan Penjara*, Hasil Penelitian, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.

Karami, Adiya Rizki, 2017, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korporasi, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sirait, Timbo Mangaranap, 2018, *Reformasi Hukum Pidana Korporasi Sistematisasi Penegakannya Secara Integral Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Suharyo dan Tim Kerja, 2005, Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Peradilan dalam Penegakan Hukum, Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Sulu, Kharisma Laras, 2016, Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Vrushi, Jon, 2020, *Global Corruption Barometer Asia 2020 Indonesia*, Hasil Penelitian, Transparency International Indonesia, Jakarta.

D. Makalah/ Pidato

Ghufron, Nurul, “Menjadi Profesional Berintegritas”, *Kuliah Umum*, KPK Goes To Campus, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 4 Mei 2021.

Moeljatno, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana”, *Pidato*, Upacara Peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, Siti Hinggil Yogyakarta, 19 Desember 1955.

Priyatno, Dwidja, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”, *Makalah*, Seminar Nasional tentang “Menjerat Korporasi Dengan Pertanggungjawaban Hukum”, diselenggarakan oleh Ikatan Hakim Indonesia, Hotel Mercure Ancol Jakarta, 24 Maret 2017.

Reksodiputro, Mardjono, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”, *Makalah*, Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, 23-24 Oktober 1989.

E. Internet

Agustin, Michael, “ISO 37001 dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi”, <https://manplawyers.co/2019/11/28/iso-37001-dan-pencegahan-tindak-pidana-korupsi-oleh-korporasi/>, diakses 10 Juni 2021.

Aji, M Rosseno, “Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020 Melorot jadi 37 Poin”, <https://nasional.tempo.co/read/1427404/skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2020-melorot-jadi-37-poin>, diakses 8 Juni 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Korupsi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, KBBI, diakses pada tanggal 5 Juli 2021.

Hadipratikto, Mungki, “Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, hlm. 1. <https://media.neliti.com/media/publications/10672-ID-eksekusi-putusan-pidana-uang-pengganti-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>, diakses tanggal 10 Juni 2022.

Hafil, Muhammad, “Bukan Pejabat, Swasta Yang Paling Banyak Terjerat Korupsi”, <https://www.republika.co.id/berita/pjwlux430/bukan-pejabat-swasta-yang-paling-banyak-terjerat-korupsi>, diakses tanggal 31 Juni 2022.

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, “Konferensi Pers Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan : Penyelamatan Kerugian Negara Dari Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi PT Indosat Mega Media (IM2) Sebesar Rp54.250.691. 139,-”, <https://www.kejari-jaksel.go.id/read/news/2022/04/13/977/konferensi-pers-kejaksaan-negeri-jakarta-selatan-penyelamatan-kerugian-negara-dari-uang-pengganti-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-pt-indosa>

t-mega-media-im2-sebesar-rp-54250691139-, diakses tanggal 31 Mei 2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>, diakses 4 Juni 2021.

Pandapotan, Heber Anggara, “Pidana Korporasi Dalam Pemberantasan Korupsi ???”, <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/maluku/files/Pidana%20Korporasi%20dalam%20Pemberantasan%20Korupsi.pdf>, diakses tanggal 10 Juni 2021.

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Dampak Korupsi terhadap Sosial dan Kemiskinan”, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>, diakses 04 April 2021.

Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, ““Terjun Bebas”, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020”, <https://pukat.korupsi.ugm.ac.id/?p=4751>, diakses 30 Januari 2021.

Ramadhan, Ardito, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Pada 2020 Peringkat 102 di Dunia”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di>, diakses 04 April 2021.

Transparency International, “*Corruption Perceptions Index 2020*”, <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>, diakses 04 April 2021.

Widyopramono, “Pidana Kejahatan Korporasi”, <http://berita.suaramerdeka.com/kejahatan-korporasi-diidentifikasi-dari-dua-hal/>, diakses 10 Juni 2021.

Winata, Dhika Kusuma, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot hingga Setara Gambia”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/380692/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-melorot-hingga-setara-gambia>, diakses 8 Juni 2021.

F. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disertai Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1303).

Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-36/A/Ft.1/06/2009 perihal Korporasi Sebagai Tersangka/Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Surat Jaksa Agung Nomor: B-116/A/JA/07/2015 tanggal 31 Juli 2015 Perihal :
Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.